

REVITALISASI PERAN PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA UMAT DI ERA GLOBALISASI DAN MODERNISASI

Izul Herman

STAI Hasan Jufri Bawean

Email: izzulanugerah@gmail.com

Abstract: The latest UNDP report of Indonesia HDI value can be made as an indicator to see quality of Indonesian human resources. Indonesia ranks 111 out of 177 countries in the index, lower than philippines since 90 persen of the 238 million citizens are muslim, the HDI value shows that Indonesia islamic human resources (Sumberdaya umat Islam) is still low. We have no choice but to improve it in order to get stategic role in the global era. Revitalizing islamic educational institution is one way of improving it. Pesantren must not keep silen in this “runway world” pesantren should respond wisely every singel global changing. The responsibility of pesantren is get ting harder and harder: it shoul be a center of moral defence on the one hand, and has to create religious and educated society, on the other hand. Therefore, it is relevant to condiser the edea of link and match as an educational system of pesantren, and also to balance the mastery of kitab kuning and kitab putih, relegious knowledge and science technology. The mastery of kitab kuning should be kept as a trade mark of pesantren, but on the same time pesantren has to support and direct santries in mastery of science technology which generally found in the kitab putih.

Keywords: Pesantren, Umat Resources, Globalization, Modernization

Pendahuluan

Negara-negara di dunia terus berlomba memacu kualitas manusianya. Didasari bahwa hanya negara-negara yang mampu melahirkan manusia-manusia berkualitaslah yang akan bisa memenangkan kompetisi. Negara-negara yang gagal menghasilkan manusia-manusia berkualitas hanya akan menjadi penonton, atau maksimal menjadi *customer* setia dari barang atau jasa yang dihasilkan negara-negara maju.

Dalam pembacaannya terhadap dinamika masyarakat global, Azyumardi Azra menegaskan bahwa keunggulan yang mutlak dimiliki bangsa ini adalah penguasaan sains-teknologi dan keunggulan kualitas sumber daya manusianya. Penguasaan terhadap sains-teknologi, sebagaimana terlihat di Amerika, Jepang, Jerman dan negara-negara lain, menunjukkan bahwa sains-teknologi merupakan salah satu faktor terpenting yang mengantarkan mereka pada kemajuan.¹

Akan tetapi, sesuai tujuan pembangunan Indonesia untuk mewujudkan manusia yang sejahtera lahir batin, maka penguasaan sains teknologi memerlukan

¹Azyumardi Azra, *Pendidikana Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium*, (Ciputat: Kalimah, 2001), 46.

perspektif etis dan panduan moral. Sebab seperti juga terlihat dari pengalaman negara-negara maju yang disebutkan tadi, kemajuan dan penguasaan sains-teknologi yang berlangsung tanpa perspektif etis dan bimbingan moral akan menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, yang dalam istilah Seyyed Hossein Nasr telah membuat manusia semakin menjauh dari pusat eksistensial-spiritualnya.

Mempertimbangkan kenyataan ini, pembangunan dan penguasaan sains-teknologi di Indonesia seyogianya berlandaskan pada wawasan moral etis. Jika tidak, maka Indonesia hanya akan mengulangi pengalaman pahit yang muncul sebagai dampak negatif sains-teknologi yang tidak memiliki wawasan tersebut. Di sinilah letak tanggung jawab kemanusiaan kita untuk mengembangkan sains-teknologi tidak untuk diri sendiri, tetapi sains-teknologi yang memiliki wawasan moral.

Dalam konteks inilah, pesantren mengemban tugas yang semakin berat, sebagai institusi pendidikan yang berbasis nilai-nilai keislaman, pesantren diharapkan meningkatkan perannya dalam *transfer of (Islamic) values* dan sekaligus *transfer of science and technology*. Padahal, pesantren sendiri hingga saat ini masih bergulat dengan sekian permasalahan yang tak kunjung selesai, seperti minimnya upaya pembaharuan, hampir tidak menyentuh ilmu-ilmu modern, pelajaran yang bernuansa *banking education*, dan orientasi yang cenderung mengutamakan pembentukan *'Abdullah* dari pada keseimbangan antara *'Abdullah* dan *kehalifatullah fi al ardl.*²

Saat ini dibutuhkan pesantren yang berwawasan global, yakni pesantren yang selalu tanggap terhadap perubahan dan tuntutan zaman, *future-oriented*, selalu mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi dan sebagainya. Namun demikian, pesantren tidak harus mengubah atau mereduksi orientasi dan idealismenya. Nilai-nilai luhur pesantren juga tidak perlu dikorbankan demi program penguatan eksistensi pesantren. Kendati harus berubah, menyesuaikan, bermetamorfosa atau apa pun namanya, dunia pesantren harus tetap hadir dengan jati diri yang khas.

Dalam tulisan ini, ada dua persoalan penting yang harus mendapat perhatian dan penanganan serius, *Pertama*, bagaimana peran pesantren dalam memformulasi pengembangan sumberdaya umat (SDU) khususnya yang berpengaruh langsung kepada komunitas pesantren itu sendiri. Apakah selama ini sudah di anggap memadai atau belum memadai? Hal ini sangat berdampak pada permasalahan *kedua* yaitu bagaimana peran pesantren dalam memformulasi pengembangan SDU, khususnya yang berpengaruh langsung kepada *output* santri. Apakah selama ini sudah sesuai dengan harapan dan tujuan yang di inginkan atau belum, sudah sesuai dengan tuntutan zaman atau belum?

Posisi pesantren dalam mengembangkan Sumber Daya Umat (SDU)

Sebelum mengurai posisi pesantren strategi pesantren dalam pengembangan SDU muslim Indonesia, penting sekali untuk dideskripsikan pengertian pendidikan

²Abd. Rachman Assegaf, "Membangun Format Pendidikan Islam di Era Globalisasi," dalam Imam Mahalli dan Musthofa (ed), *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2004), 8-9.

Islam. Pengertian itu bisa dijadikan sebagai pijakan awal tentang posisi pesantren dalam pengembangan SDU muslim. Di dalam laporan hasil *World Conference on Muslim Education* yang pertama di Mekah tanggal 31 Maret sampai 8 April 1977, disebutkan:

*“Education should aim at balanced growth on the total personality on man through the training of man’s spirit, intellect, the rasional self, feeling and bodily senses. Education soul therefore cater for the growth of man in all aspects: spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic both individually and collectively and motivate all these aspects toward goodness and the attainment of perfection. The ultimate aim of muslim education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large.”*³

Definisi di atas sama sekali tidak menunjukkan unsur atau semangat dikotomik. Al-Ayaibany juga mempertegas bahwa umat muslim dituntut menguasai ilmu pengetahuan apa saja dan sekaligus memiliki *skill* yang berkualitas sehingga bisa eksis dalam percaturan sosial, ekonomi, politik, dan sains-teknologi baik lingkup lokal, nasional, maupun global.

Masyarakat muslim juga sudah menilai bergeser ke arah “pragmatis” di dalam pemaknaan dalam pendidikan. Orientasi mereka mendidik putrinya di sekolah atau di perguruan tinggi adalah agar dapat memperoleh pekerjaan yang baik. Hal itu disebabkan, antara lain, kegagalan lembaga-lembaga pendidikan islam memberikan bekal pengetahuan tambahan. Pendidikan islam sejauh ini cenderung berkutat pada pengetahuan moral daripada pengetahuan keterampilan praktis. Bahkan, pengetahuan moral pun mengalami penurunan kualitas. Masalah moral lebih bersifat kognitif ketimbang afektif dan psikomotoriknya⁴.

Kita bisa sepakat bahwa pendidikan telah memainkan peran penting dalam upaya melahirkan SDU yang handal dan dapat menjawab tantangan zaman. SDU tersebut merupakan gerakan *human investment* karena memiliki kompleksitas keilmuan yang sejalan universalitas itu sendiri. *Human investment* merupakan upaya jangka panjang untuk melahirkan SDU yang berkualitas: manusia terdidik yang memiliki ilmu pengetahuan dan mempunyai kualitas yang tinggi: manusia yang berkaliber nasional dan internasional.

Pesantren sesungguhnya bisa mengambil peran yang lebih besar daripada apa yang telah diperbuatnya selama ini. Sejarah menempatkan pesantren pada posisi yang cukup istimewa dalam khazanah dinamika sosial budaya Indonesia. Tidak berlebihan jika Abdurrahman Wahid memposisikan pesantren sebagai subkultural tersendiri dalam masyarakat Indonesia, sebab pesantren merupakan elemen determinan dalam struktur piramida sosial masyarakat Indonesia.

Memang benar bahwa tugas pokok yang dipikul pesantren selama ini adalah mewujudkan umat muslim Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

³Hasan Langgung, *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 308.

⁴Ahmad Darmadji, *Pendidikan Islam dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*, “ dalam Musleh Usa dan Aden Wijaya (ed.), *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, (Yogyakarta: Adytya Media, 1997), 192.

Secara khusus lagi, pesantren bahkan diharapkan dapat memikul tugas yang tidak kalah pentingnya, yaitu melakukan reproduksi ulama'. Dengan kualitas ke-islaman, keimanan, keilmuan dan akhirnya, para santri diharapkan mampu membangun dirinya dan masyarakat di sekelilingnya. Di sini, para santri diharapkan memainkan fungsi ulama' dan pengakuan terhadap fungsi keulamaan mereka biasanya pelan-pelan tapi pasti datang dari masyarakat.

Pesantren sepatutnya memerankan fungsi dan misi *profetis* di atas dalam peningkatan kualitas SDU-nya, baik dalam penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam hal karakter, sikap moral, penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Dengan kata lain, pesantren secara ideal harus berfungsi dan berperan membina dan menyiapkan santri yang berilmu, berteknologi, berketerampilan tinggi, dan sekaligus beriman dan beramal sholeh. Pesantren harus mampu mengejar ketertinggalan-ketertinggalan dalam menyiapkan SDU yang berkualitas.

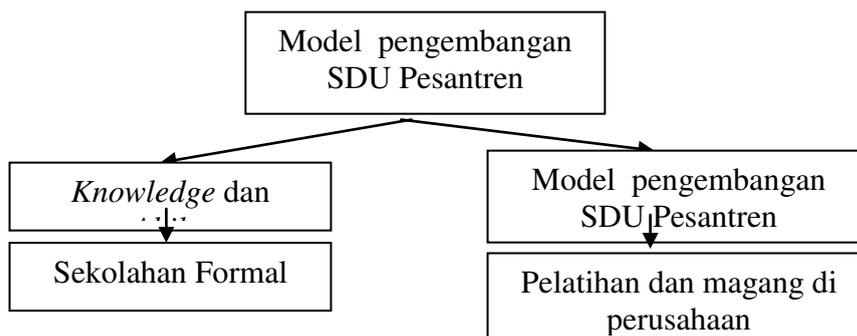
Juga tidak kalah pentingnya, pesantren harus mengorientasikan diri kepada menjawab kebutuhan dan tantangan yang terus muncul di tengah masyarakat sebagai konsekuensi dari lajunya perubahan yang terus menerus. Untuk itu, bila ada alternatif lain, kecuali penyiapan SDU yang berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian dan keterampilan. Hanya dengan tersedianya kualitas SDU yang berkualitas tinggi itu, Indonesia bisa *survive* di tengah pertarungan ekonomi dan politik yang terus kian kompetitif.

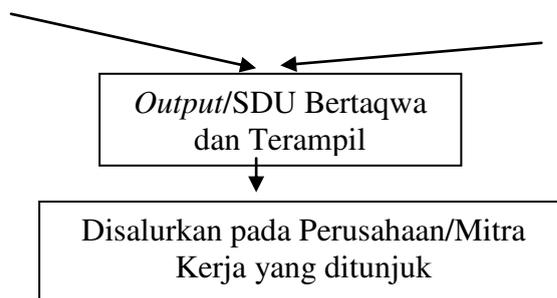
Strategi Pesantren dalam Pengembangan Sumber Daya Umat

1. Model Pengembangan Sumber Daya Umat

Khusus mengenai penyiapan SDU pesantren yang nantinya diharapkan bisa membawa angin segar perubahan, sehingga *output* yang dihasilkan benar-benar profesional dan kompetitif di tengah tuntutan zaman yang semakin kompleks ini, paling tidak ada beberapa langkah integratif, yang merupakan gabungan antara teori dan praktek. Semua ini dilakukan dalam rangka penyiapan sumber daya santri yang handal dan profesional. Tawaran model pengembangan sumber daya tersebut secara integratif dapat dilihat pada bagan berikut:

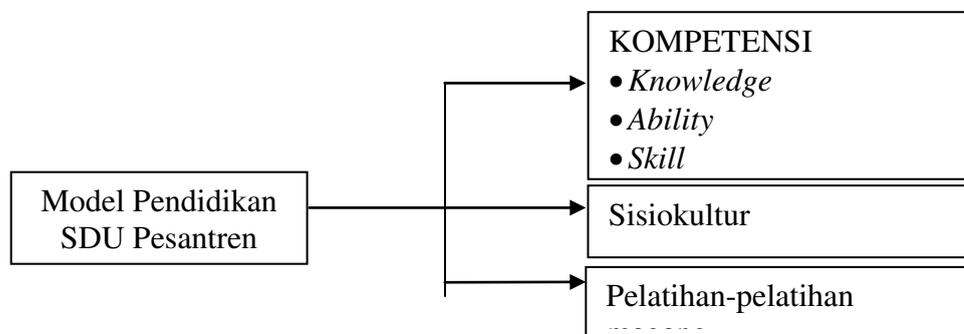
Bagan I
Model Pengembangan SDU di pesantren



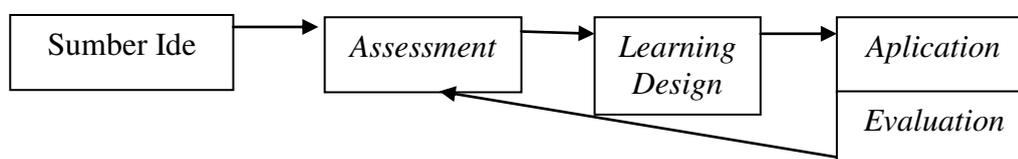


Bagan I di atas menunjukkan bahwa model pengembangan SDU pesantren harus mengacu kepada dua model pengembangan, yaitu berupa pemberian bekal secara teoritis yang berupa *knowledge* dan *ability*. Kedua hal ini dapat di tempuh melalui pendidikan formal. Sedangkan model pengembangan kedua berupa pemberian semacam *life skill* dengan cara pelatihan dan magang di perusahaan-perusahaan yang telah di tunjuk sebagai mitra kerja pesantren. Dengan model pengembangan integratif seperti ini, diharapkan *output* (SDU) yang dihasilkan menjadi beriman, bertaqwa, berilmu, dan terampil. Sehingga mereka siap disalurkan ke berbagai perusahaan/mitra kerja yang telah ditunjuk untuk mengaplikasikan segala kemampuan yang dimilikinya.

Bagan II
Model Pendidikan SDU Pesantren



Bagan II menunjukkan tentang model pendidikan menuju SDU pesantren handal dan profesional. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan penguatan-penguatan materi pendidikan yang memuat *Knowledge*, *Ability* dan *Skill*. Juga tidak boleh dilupakan dalam model pendidikan ini adalah senantiasa memberikan penguatan-penguatan materi yang tidak terlepas dari kontekstualisasi sosio-kultur Indonesia, sebab pesantren yang berkembang di Indonesia merupakan *indigeneous culture* (kultur asli) Indonesia. Secara integratif juga dilakukan pelatihan-pelatihan dan magang di berbagai instansi/tempat yang dapat menunjang pendidikannya untuk bekal di hari esok.

Model Pembelajaran *Skill Pesantren*

Adapun model pembelajaran *Skill* yang harus dipilih pesantren, sebagaimana ditunjukkan pada bagan di atas, harus melalui proses-proses yang dimulai dari munculnya sumber ide, kemudian dilakukan *Assessment* (pendampingan), kemudian di susun desain pembelajaran secara matang. Untuk selanjutnya di aplikasi secara benar. Terakhir, dilakukan evaluasi komprehensif terkait apakah proses yang dijalankan sesuai dengan rencana atau belum. Jika belum sesuai dengan rencana, maka harus di lakukan lagi sehingga di temukan model pembelajaran yang pas dan sesuai harapan.

Model-model pengembangan SDU pesantren yang di tawarkan di atas adalah tidak hanya di tekankan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik para santri semata, tetapi juga aspek teoritis dan praktis yang di orientasikan terhadap segala kebutuhan hidup pragmatis seorang santri jika saatnya tamat dari pesantren. Dengan model ini, di harapkan *output* (SDU) pesantren benar-benar siap berkompetisi di masyarakat. Hal demikian sekaligus mengikis segala anggapan minor tentang pesantren yang tradisional, kolot, jumud (stagnan), dan berbagai labelitas miring tentangnya. Pesantren akan senantiasa mengalami dinamisasi seiring dengan ritme perkembangan zaman yang terjadi, sesuai dengan adagium yang dipegangnya, yaitu “*al- mubafadzah ‘ala al-qadim ash-shalih wa al akhdzu bi al jadid al-aslah*”.

2. Menimbang *link and match* dalam kurikulum pesantren

Link and match merupakan sebuah istilah yang dimunculkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan (1993-1998), Wardiaman Djojonegoro, setelah terbentuknya Kabinet VII. *Link and match* dalam dunia pendidikan bisa diartikan penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Wardiaman baru-baru ini kembali mengingatkan pentingnya *link and match* dalam dunia pendidikan. Era globalisasi, menurutnya, menurut sumberdaya manusia tangguh. Pendidikan yang berorientasi aspek kompetensi menjadi kuncinya paradigma pendidikan harus mulai berubah dari *supply minded* (orientasi jumlah) menjadi *demand minded* (kebutuhan) dunia kerja ke depan. Sekolah dituntut mampu menerjemahkan kebutuhan ini.

Untuk itu, lembaga pendidikan wajib mengerjakan kompetensi, bukan hanya sekedar ijazah. Proses dan penyelenggaraan pendidikan harus fleksibel (lentur), bisa dengan sistem modul. Syarat lainnya, guru juga harus berpikiran terbuka dan mengoptimalisasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak dini, sains dan teknologi

harus mulai diperkenalkan kepada siswa, bahkan tingkat sekolah dasar. Negara tetangga yang patut dicontoh keberhasilan adalah Malaysia dan Singapura.

Kalau sistem pendidikan tidak mampu mengadakan penyesuaian diri secara tepat waktu, menurut Muchtar Buchari (1995: 26), maka akan terjadi kesenjangan antara dunia kerja dan kehidupan di sekitarnya. Kesenjangan itulah yang disebut *educational mismatch*. Konotasi yang terdapat dalam istilah terakhir ini ialah bahwa kesenjangan yang ada dalam masyarakat sekarang ini terjadi terutama karena sistem pendidikan tidak mampu mengungkap, memahami dan menanggapi kenyataan-kenyataan baru yang muncul di sekitarnya.

Konsep *link and match* yang digagas Wardiman dikritik sejumlah kalangan. Darmaningtyas (2005) dalam bukunya "*Pendidikan Rusak-Rusakan*" menganggap konsep *link and match* telah menjadikan institusi pendidikan sebagai supermarket atau pasar swalayan adalah bila banyak pengunjung yang datang dan membeli barang-barang yang dijualnya, sehingga barang-barang itu akan habis. Para pengelola pendidikan juga mempunyai prinsip yang sama, banyak orang memasukkan anaknya ke sana, mampu membayar mahal, dan setelah lulus mendapat kerja.

Pendidikan semacam ini dianggapnya menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk melahirkan buruh-buruh bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat. Padahal tidak semua orang mau terjun ke dunia industri, ada orang yang lebih senang bergerak di sektor agraris, perdagangan, seni dan lainnya.

Jika diamati secara jernih, kritik Darmaningtyas perlu diuji akurasi. Pengandaian bahwa pendidikan seperti swalayan yang menawarkan berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat memang benar. Tetapi kemudian ada inkonsistensiterhadap analogi yang dia buat sendiri. Apabila pendidikan dianalogikan sebagai supermarket, berarti pendidikan tidak hanya menawarkan satu bidang lulusan saja.

Di dalam supermarket terdapat berbagai macam produk, begitu juga dengan pendidikan yang menghasilkan banyak lulusan dengan spesialisasinya sendiri-sendiri. Jadi, tidak pas mengatakan bahwa pendidikan hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan industri dunia kerja saja. Yang dimaksud kebutuhan pasar dalam kacamata pendidikan adalah bagaimana pendidikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspeknya, misalnya; pertanian, perikanan, perbankan, arsitektur, seniman, industri, dan lain sebagainya. Selain itu jurusan yang ada di perguruan tinggi, misalnya, bukan hanya berkaitan dengan industri saja. Ini adalah bukti bahwa pendidikan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan industri.

Argumentasi lain yang dapat dibangun mengenai relasi *output* pendidikan dengan kebutuhan pasar adalah banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang menjadi pengangguran. Ini terjadi karena kualifikasi dan disiplin ilmu yang mereka miliki tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak ada manusia yang tidak butuh pekerjaan. Semuanya butuh pekerjaan, walaupun jenis pekerjaannya berbeda-beda. Secerdas

apapun seorang mahasiswa, tetapi setelah menyelesaikan studinya (baca: wisuda) ternyata tidak mendapatkan pekerjaan, maka dia pasti bingung, stres dan sebagainya.

Dari kacamata agamapun, citra pragmatis itu malah dianjurkan. Islam, misalnya, melarang manusia melakukan perbuatan untuk kepentingan akhirat dengan cara melupakan perbuatan untuk kepentingan kehidupan dunia, begitu juga sebaliknya, juga tidak diperbolehkan mencari kebahagiaan dunia sementara kehidupan akhirat terabaikan. Dari sini bisa dikatakan bahwa kesesuaian antara *output* pendidikan dengan kebutuhan pasar adalah satu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar.

Jika dalam dunia pendidikan umum, dan lebih-lebih lagi dalam pendidikan kejuruan, tuntutan program *link and match* lebih diarahkan untuk mencetak tenaga terdidik yang siap pakai untuk memasuki berbagai bursa kerja pada era teknologi industri modern, maka bagaimana dengan program *link and match* dalam dunia pendidikan islam?

Peluang implementasi *link and match* dalam pendidikan pesantren masih sangat terbuka. Ajaran-ajaran pesantren yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist mengingatkan agar umat muslim menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Al-Qur'an memberi pesan kepada umat muslim untuk tidak hanya mengejar kepuasan duniawi dengan menyampingkan kedamaian ukhrawi. Demikian pula sebaliknya, kedamaian ukhrawi jangan sampai melalaikan diri dari kebutuhan duniawi.

Pesan Allah Swt dalam QS. Al-Jumu'ah: 9-10 dan QS. Al-Qashos: 77 merupakan pondasi yang sangat kuat bagi pesantren untuk mengembangkan konsep *link and match* dalam model pendidikannya. Kaum pesantren mulai dari kiai, ustadz atau ustazdah, dan para santri adalah " makhluk materiil" yang tentu saja membutuhkan materi. Mereka membutuhkan sandang, pangan, dan papan yang berkualitas dalam kehidupannya.

Untuk memperolehnya, semua orang harus berusaha dan usaha itu akan mencapai hasil optimal apabila syarat-syarat keberhasilannya terpenuhi, diantaranya: pengetahuan dan *skill* masing-masing individu. Usaha itu bisa berupa usaha mandiri atau bekerja kepada orang lain. Usaha mandiri mensyaratkan adanya finansial dan kemauan sebagai modal utamanya. Akan tetapi, bagi alumni pesantren yang tidak memiliki finansial, maka pengetahuan dan *skill* merupakan modal utama yang mutlak dimiliki. Bagaimana seseorang bisa diterima disebut perusahaan, sementara dirinya tidak memiliki pengetahuan dan *skill* memadai sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pesantren dituntut mampu membekali para santrinya dengan pengetahuan dan *skill* yang dibutuhkan dunia kerja, sehingga alumni pesantren tidak kebingungan harus bekerja apa di masyarakat.

Sebagai institusi pendidikan mandiri, pesantren memiliki kebebasan untuk mengembangkan pengetahuan apa saja yang dipandang penting bagi umat muslim. Pesantren tidak terikat oleh paket kurikulum nasional yang tidak bisa ditawar-tawar sebagaimana di institusi pendidikan formal model sekolah atau madrasah. Di saat

para praktisi pendidikan dan politisi di Senayan “geger” memperdebatkan konsep *link and match*, pesantren bisa bergerak lebih dahulu tanpa tergantung kepada kemauan pemerintah atau gagasan pesantren-pesantren lainnya.

Kurikulum yang dipergunakan pesantren dalam melaksanakan pendidikannya tidak sama dengan kurikulum yang dipergunakan di lembaga pendidikan formal, dan bahkan dengan pesantren lainnya. Kurikulum pesantren yang menjadi arah pembelajaran tertentu umumnya diwujudkan dalam bentuk penetapan kitab-kitab tertentu sesuai dengan tingkatan ilmu pengetahuan santri. Model pembelajaran yang diberikan pondok pesantren sejatinya sejalan dengan salah satu prinsip pembelajaran modern yang dikenal dengan pendekatan belajar tuntas (*mastery learning*), yaitu dengan mempelajari sampai tuntas kitab pegangan yang dijadikan rujukan utama untuk masing-masing bidang ilmu yang berbeda. Akhir pembelajaran terjadi bersamaan dengan tamatnya kitab yang dipelajari⁵

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pesantren merupakan *the schooling society* dengan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat pembelajar dan menjadikan belajar sebagai proses yang berjalan terus menerus. Pola ini pada gilirannya menjadikan pendidikan pesantren tidak membuat batas secara tegas antara santri itu sendiri dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian pula, pesantren tidak membatasi waktu belajar dalam sekat-sekat waktu yang kaku sehingga proses pembelajaran dan pendidikan selama 24 jam hadir penuh dalam bentuk yang nyata tanpa harus “memberatkan” siapapun yang terlibat di dalamnya⁶

Kiai sebagai pemilik tunggal pesantren dapat dengan cepat memutuskan arah pendidikan di pesantrennya masing-masing dalam merespons dinamika zaman dan kebutuhan umat. Jika kiai memandang bahwa pendidikan non agama dan skill sangat dibutuhkan oleh umat muslim, maka kiai bisa langsung memutuskan implementasi konsep *link and match* dalam pendidikan di pesantrennya tanpa harus meminta restu kepada instansi pemerintah yang menangani pendidikan.

Apakah implementasi *link and match* ini akan mengimplementasikan pendidikan agama Islam di pesantren? Jawabannya, tentu saja tidak. Pesantren adalah institusi pendidikan Islam tertua di nusantara ini. jika umat ternyata sangat membutuhkan *skill* untuk kepentingan ekonomi mereka, maka pesantren harus meresponsnya secara bijaksana. Tokoh-tokoh pendidikan tanah air. Terutama pengamat pendidikan pesantren, tidak perlu khawatir akan religiusitas dan moralitas pesantren. *Link and match* tidak mengeliminasi pendidikan pesantren sesuai kebutuhan umat, sehingga eksistensi pesantren bisa benar-benar dirasakan umat baik dalam aspek keagamaan maupun sosial dan ekonominya.

Banyak pengamat dan praktisi pendidikan yang menolak *link and match* karena dihantui rasa takut bahwa konsep tersebut akan menghilangkan pendidikan nilai di

⁵Depag RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Depag RI, 2003), 9.

⁶Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), 17-18.

Indonesia. Kekhawatiran itu bisa dipahami sebagai wujud kepeduliannya terhadap nilai-nilai sosial dan agama di Indonesia. Bahkan ada yang menyebut *link and match* sebagai robotisasi manusia. *Link and match* dipandang menjadikan manusia sebagai mesin-mesin pelayan industrialisasi dan globalisasi. Pandangan-pandangan semacam itu tentu saja harus disambut secara positif sebagai bagian dari dialektika gagasan.

Akan tetapi, terlalu takut atau bahkan fobia terhadap konsep *link and match* juga kurang bijaksana. Harus jujur diakui bahwa masyarakat kita membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan hidup mereka. Bukankah sering dijumpai para pencari kerja yang berjubel pada saat Dinas Tenaga Kerja menggelar bursa Tenaga kerja? Bukankah telah diketahui bersama bahwa pengangguran di negeri ini sangat banyak yang disebabkan oleh, antara lain, karena ketidaksesuaian kompetensi mereka dengan *skill* yang dibutuhkan di pasar? Hal inilah yang sepatutnya menjadi perhatian semua pihak, termasuk institusi pendidikan semacam pesantren.

Memang saat ini sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan yang bergerak di pengembangan *skill*, terutama SMK yang pertumbuhannya berlipat ganda. Akan tetapi, akibat materi pelajaran di kurikulum SMK sangat banyak, kemampuan *skill* para alumninya kurang optimal. Pelajaran yang harus dilahap oleh siswa dalam satu tahun ajaran berkisar antara 16-18 pelajaran, meliputi kurikulum nasional dan lokal, yang beberapa di antaranya kurang memiliki relevansi dengan jurusan yang ditempuh siswa. Akibatnya, siswa hanya menguasai “sedikit” dari masing-masing pelajaran.

Di samping pelajarannya yang terlalu banyak dan kurang relevan dengan kompetensi yang diharapkan para siswanya dengan pendidikan agama yang memadai. Di banyak sekolah atau PT umum, pengetahuan agama mendapat porsi yang sangat sedikit. Di sinilah signifikansi pendidikan pesantren. Pesantren dapat mengembangkan *link and match* dengan materi-materi yang relevan saja dengan kompetensi dan *skill* yang dibutuhkan, serta memberi porsi pengetahuan dan pengalaman agama yang cukup bagi santrinya. Dengan demikian, profil lulusan yang dihasilkan pesantren adalah orang yang memiliki kedalaman ilmu-ilmu agama Islam dan sekaligus *skill* yang dibutuhkannya dalam hidup di masyarakat global sekarang ini.

3. Menyeimbangkan Kitab Kuning dan Kitab Putih

Di pesantren, terutama pesantren salaf, tidak dikenal kurikulum dalam arti kurikulum seperti kurikulum pada lembaga pendidikan formal. Kurikulum pada pesantren salaf disebut *manhaj* (arah pembelajaran) yang berupa *Fanun* kitab-kitab yang diajarkan kepada para santri. Dengan demikian, tamatnya program pembelajaran tidak diukur dengan satuan waktu, juga tidak didasarkan pada penguasaan terhadap silabus, tetapi didasarkan pada tuntasnya santri mempelajari kitab yang telah

ditetapkan. Standar kompetensi bagi santri adalah kemampuannya memahami, menghayati, mengamalkan dan mengajarkan isi kitab yang telah dipelajarinya⁷

Memang materi pelajaran di pesantren hampir semuanya berupa buku-buku berbahasa Arab yang dikenal dengan kitab kuning, karena pada umumnya kitab-kitab itu dicetak dengan memakai kertas yang berwarna kuning (Depag, 2003:32). Selain istilah kitab kuning, sejumlah pihak juga menyebutnya sebagai kitab klasik, sebab memang banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh ulama'-ulama' pada abad pertengahan. Tetapi, tidak sedikit kitab-kitab yang ditulis oleh ulama'-ulama' kontemporer.

Dalam penelitiannya tentang kitab kuning, Martin Van Bruinessen (1999) berhasil menghimpun sekitar 900 kitab kuning yang berbeda-beda. Kitab tersebut 500 karya berbahasa Arab, 200 karya berbahasa Melayu, 120 karya berbahasa Jawa, 35 berbahasa Sunda, 25 karya berbahasa Madura, dan 5 karya berbahasa Aceh. Di antara kitab-kitab tersebut terdapat sekitar 100 kitab yang populer sebagai kurikulum pesantren.

Menurut Suryadharma Ali, kitab kuning merupakan *trade mark* pesantren. Kitab kuning menjadi pengetahuan yang kontemporer karena kitab kuning masih sangat relevan untuk dijadikan rujukan. Dalam kerangka itulah, dirinya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang sepatutnya terhadap penyelenggara even-even *Musabaqah Qira'atul al-Kitab* (MQK) sebagai ajang prestisius kalangan santri yang memiliki kualifikasi dan pendalaman isi kitab kuning. Diharapkan, MQK dapat menjadi daya dorong yang kuat bagi santri untuk mempelajari dan mengkaji ilmu-ilmu Islam dalam berbagai cabangnya.

Budaya kitab kuning yang ada di pesantren, dalam analisis Tolhah Hasan, ternyata bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern ini. Menurutnya, bukan sekarang saja kontekstualisasi terjadi akan tetapi sejak sebelum ada kitab kuning sampai kitab kuning ada, usaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat telah terjadi. Kontekstualisasi kandungan kitab kuning menjadi penting. *Pertama*, adanya perubahan sistem sosial budaya. Kalau hal ini tidak diperhatikan maka masyarakat tidak akan lagi tertarik dengan pesantren. *Kedua*, terjadinya realitas kepentingan umat. *Ketiga*, adanya temuan baru dalam IPTEK. Dulu ulama' berijma' bahwa bumi ini tidak bergerak kecuali bila ada faktor lain. Kalau pemahaman ini tidak dikontekstualisasikan, maka kitab kuning tidak akan menarik untuk dipelajari. *Keempat*, adanya tantangan baru yang dihadapi umat. Maka, perlu ada kesepakatan baru para ulama' tentang kedua hal terakhir tersebut⁸

Menurut Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Mohammad Ali, dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, pesantren salafiyah seharusnya tidak hanya

⁷Depag RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah : Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Depag, 2003, 31-32.

⁸Pip. "Santri Tidak Hanya Menguasai Kitab Kuning Saja." www.pondokpesantren.net, [Diakses 1 September 2016]

mengembangkan dalam memahami kitab kuning saja namun juga dituntut kemampuannya dalam memahami cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain dalam kategori sains dan teknologi (www.pondokpesantren.net.).

Ini merupakan dorongan agar pesantren tidak mendikotomikan ilmu agama dan non agama. Sains dan teknologi merupakan kebutuhan masyarakat kontemporer. Tanpa bermaksud beromantika pada masa lalu, kita perlu mengambil pelajaran dari dinamika pada abad ke-9 hingga ke -11 M. Yang merupakan masa kejayaan umat Muslim di berbagai bidang, termasuk di bidang sains dan teknologi. Pada masa itu lahir ilmuan-ilmuan Muslim Arab dan Timur Tengah. Mulai dari Jabir Ibnu al-Hayyan, seorang ahli terbesar abad pertengahan, sampai dengan Umar al-Khayyan, ahli matematika, astronom, dan penyair.

Tetapi sejak awal abad ke-13, umat muslim mengalami kemunduran luar biasa akibat tekanan fundamentalisme agama dan gangguan kelompok-kelompok yang lambat laun, menghambat usaha-usaha ilmiah. Pada masa-masa berikutnya muncul supremasi ilmu-ilmu agama di atas ilmu-ilmu non-agama. Hal itu menimbulkan dampak yang sangat besar bukan hanya terhadap dinamika ilmu pengetahuan tetapi peradaban muslim (*moslem civilization*) secara keseluruhan.

Hal itu pada gilirannya menimbulkan dikotomisasi dan antagonisasi sebagai cabang ilmu. Padahal, seperti dikemukakan Sayyed Hossein Nasr, berbagai cabang ilmu atau bentuk-bentuk pengetahuan dipandang dari perspektif islam pada akhirnya adalah satu. Islam tidak mengenal pemisahan ilmu agama dan ilmu non-agama. Berbagai ilmu dan perspektif intelektual yang dikembangkan dalam islam memang mempunyai hierarki. Tetapi hierarki tersebut pada akhirnya bermuara pada pengetahuan yang maha tunggal, substansi dari segenap ilmu .

Peradaban gemilang umat muslim bisa di raih apabila ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia mereka dikembangkan dengan baik, umat muslim jangan berharap akan mampu meraih kembali masa-masa keemasan (*the golden age*) di abad pertengahan jika pendidikan islam hanya diorientasikan pada pembelajaran agama, atau lebih pasnya, *Fiqh oriented education* (pendidikan berorientasi Fiqh).

Secara dogmatis, islam tidak mengajarkan agar umatnya meninggalkan sains dan teknologi. Sebaliknya, islam mewajibkan agar untuk muslim tidak henti-hentinya menuntut ilmu apa saja, asalkan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Hal ini dengan jelas disabdakan oleh Rasulullah SAW. “tuntutlah Ilmu mulai dari pangkuan ibu hingga ke liang lahat” Nabi juga mendorong agar umat muslim menuntut ilmu ke daerah-daerah yang menjadi gudang ilmu pengetahuan dan memiliki peradaban yang maju, “Tuntutlah Ilmu walaupun ke Negeri China” (*utblubul al-ilm walaun kana bi al-shin*)” Hadist di atas diawali dengan kata *amar*, yang secara tata bahasa Arab bermakna wajib (baca :dorongan yang sangat kuat). Kewajiban menuntut ilmu itu diperkuat dengan hadist beliau yang lain. “menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat islam laki-laki dan perempuan” Karenanya, para ulama’ sepakat bahwa menuntut ilmu hukumnya adalah fardhu ‘ain (kewajiban yang mengenai semua umat

Muslim). Ini sekaligus menegaskan tidak ada diskriminasi, baik kepada kaum Adam ataupun kaum hawa untuk menimba ilmu di mana dan kapan saja.

Apalagi, kini kita hidup di era globalisasi dengan berbagai menu dan feature yang disuguhkan dalam dunia tanpa batas ini. Alvin Toffler, dalam *The Third Wave*, menjelaskan perubahan umat manusia dari gelombang peradaban pertama, kedua dan ketiga dengan analisis empat sistem yang saling berkaitan: *techno-sphere*, *info-sphere*, *socio-sphere* dan *psycho-sphere*. Keempat sistem ini membentuk, mempengaruhi dan menentukan dinamika masyarakat dunia. Di antara keempat pemetaan Toffler di atas, menurut saya, kita sangat tertinggal dalam dua hal : *techno-sphere* dan *info-sphere*. Jika diamati, *info-sphere* berbanding seiring dengan dinamika teknologi.

Dalam upaya penyeimbangan pendidikan ilmu agama dan sains teknologi, sejatinya pesantren bisa tetap menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab. Pesantren tinggal mengimpor materi pelajaran sains dan teknologi yang di tulis bahasa Arab dari negara-negara berbahasa Arab. Dengan demikian, santri tetap memiliki keahlian tentang kitab gundul akan tetapi, persoalannya adakah atau seberapa banyak kiai yang menguasai materi sains dan teknologi untuk di ajarkan kepada santri-santrinya. Sepertinya, sangat sedikit kalau tidak mau dikatakan tidak ada kiai yang menguasai sains dan teknologi. Kebanyakan kiai hanya menguasai ilmu-ilmu agama.

Solusi alternatif yang bisa dilakukan pesantren adalah pengajaran sains dan teknologi itu diambil dari “kitab-kitab putih,” yaitu literatur berbahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris sebagaimana yang dipelajari di lembaga pendidikan formal baik sekolah maupun perguruan tinggi. Tenaga pendidiknya bisa diambil dari mana saja, alumni pesantren atau bukan, yang memiliki keahlian pada bidang-bidang yang dibutuhkan pesantren tersebut.

Hadirnya kitab-kitab putih sains teknologi di pesantren bukan lantas menggeser kitab kuning yang merupakan *trade mark* pesantren. Sebaliknya kitab putih merupakan perlengkapan materi pelajaran di pesantren sebagai salah satu wujudnya respons terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat global. Dengan keseimbangan kitab kuning dan kitab putih tersebut, maka eksistensi pesantren akan memberikan nilai plus bagi masyarakat. Hal ini akan bisa di capai apabila tokoh-tokoh pesantren memiliki kepekaan dan *good will* untuk menjawab dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang kini tengah menjalani globalisasi.

4. Reformasi Manajemen Pesantren

Paradigma pendidikan di dunia maju sudah bergeser pada pemahaman bahwa belajar tidak hanya di kelas, melainkan juga di luar kelas. Dalam konteks ini, pendidikan pesantren di tuntut mengembangkan *life skill and leadership skill education*. Metode pendidikan pesantren mengajarkan pada masyarakat bahwa pendidikan itu tidak terpisah dari masyarakat, sehingga pendidikan pesantren mudah menyesuaikan

dengan perkembangan yang terjadi. Pendidikan pesantren harus menjadi *leading sektor* sehingga tercipta kesempatan belajar secara kontinyu dan menjadi *learning society*.⁹

Sebagai institusi yang otonom, pesantren memiliki wewenang menjalankan fungsi-fungsi pokok manajemennya (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan) secara mandiri. Pelaksanaan manajemen pesantren yang efektif dan efisien menuntut dilaksanakannya keempat fungsi pokok manajemen tersebut secara terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan bidang-bidang kegiatan manajemen pendidikan. Melalui manajemen pesantren yang efektif dan efisien tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan pesantren secara keseluruhan.

Malik Fadjar: (1998: 91)¹⁰ mengingatkan bahwa pengelola suatu lembaga pendidikan, seperti pesantren, bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi yang di maksud mengelola tidak sekedar dalam pengertian “Mempertahankan” yang sudah ada, tetapi melakukan pengembangan secara sistematis dan sistemik, yang mengikuti aspek ideologis (visi dan misi), kelembagaan dan langkah operasionalnya serta mencerminkan pertumbuhan (*growth*), perubahan (*change*), dan pembaruan (*reform*).

Sekedar mempertahankan, lanjut Fadjar, mungkin relatif lebih mudah untuk dilakukan. Tetapi penyikapan terhadap pendidikan yang cenderung *status quo* akan segera mendatangkan petaka bagi pesantren. Secara perlahan tapi pasti, pesantren semacam ini akan tertinggal dalam butiran sejarah, karena ketidakmampuannya mengadakan hubungan dialektis dengan zaman dan realitas yang selalu menuntut sikap transformatif.

Karenanya dalam rangka mewujudkan pesantren yang peka zaman perlu ditetapkan program manajemen pesantren yang meliputi empat unsur tersebut. *Pertama, pesantren review*, yaitu suatu proses yang di dalamnya seluruh pihak madrasah bekerja sama dengan pihak-pihak yang relevan untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas kebijaksanaan pesantren, program pelaksanaannya serta mutu lulusannya. Melalui *pesantren review* diharapkan akan dapat menghasilkan suatu laporan yang membeberkan kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan dan prestasi pesantren serta memberikan rekomendasi untuk menyusun perencanaan strategis pengembangan pesantren pada masa-masa mendatang, tiga atau lima tahun berikutnya.

Kedua, quality assurance, yaitu sebagai jaminan bahwa proses yang sedang berlangsung telah di laksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang di tetapkan. Dengan demikian diharapkan dengan proses itu akan menghasilkan *output* yang memenuhi standar pula. Untuk itu di perlukan mekanisme kontrol agar semua kegiatan yang dilaksanakan di pesantren terkondisi dalam standar proses yang ideal tadi. Dengan *quality assurance* ini pihak pengurus dapat menunjukkan kepada

⁹H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 10.

¹⁰Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998), 91.

masyarakat bahwa pesantrennya senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh santri-santrinya.

Ketiga, quality kontrol yaitu suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas *output* yang tidak sesuai dengan standar. Standar kualitas ini dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui maju mundurnya pesantren. Semua pesantren baik *salaf* maupun *kebalaf* dapat melakukan *quality control*.

Keempat, bench marking, yaitu kegiatan untuk menetapkan suatu standar, baik proses maupun hasil yang akan dicapai pada periode tertentu. Untuk kepentingan praktis standar tersebut direfleksikan dari realitas yang ada seperti dalam hal perilaku mengajar ustadz atau ustadzah, standar yang ditetapkan adalah dengan merefleksikan salah seorang guru yang dikenal (*internal bench marking*), baik dalam mengajarnya, demikian pula dalam hal standar kualitas pendidikan, direfleksikan dari suatu pesantren sekolah yang baik (*external bench marking*).

Penutup

Globalisasi kini merangsang setiap sudut negara-negara dunia ini. Tidak terkecuali negara Indonesia. Globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Tidak seorangpun bisa menghindarinya. Kita maju, diam, atau (apalagi) mundur, globalisasi pasti menyergap kita. Tidak ada satu ruangpun yang tidak terkena dampak dari globalisasi, termasuk ruang pendidikan, *wabil khusush* pendidikan pesantren. Mau tidak mau dan suka tidak suka pesantren harus meresponsnya cepat, tepat dan bijaksana.

Pesantren seyogianya menempatkan globalisasi sebagai tantangan, bukan ancaman yang dapat membumi hanguskan “peradaban” pesantren. Pesantren tidak akan musnah gara-gara globalisasi. Eksistensi pesantren sudah teruji di setiap dinamika zaman yang silih berganti. Namun demikian, tidak berarti bahwa pesantren bisa tinggal diam atau bersikap acuh tak acuh terhadap globalisasi. Sebaliknya, pesantren harus meresponsnya dengan melakukan revitalisasi amal usahanya bagi bangsa ini.

Revitalisasi pesantren yang bisa dipilih adalah memperkuat eksistensi dirinya sebagai institusi pendidikan islam yang *concern* pada pengembangan SDU Muslim Indonesia. Pesantren memiliki kelebihan yang praktis tidak dimiliki oleh institusi-institusi sosial pendidikan lain, yaitu berupa nilai-nilai moralitas, religiusitas, kebersamaan, kesahajaan dan sebagainya. Nilai-nilai itu sangat luar biasa apabila di sandingkan dengan keluasan sains – teknologi dan kecakapan *skill* setiap individu yang dididik di pesantren. Pesantren bukan lagi institusi pendidikan islam tradisional yang berkutat dengan masalah-masalah keagamaan saja, tetapi juga mampu mendedikasikan dirinya dalam pengembangan sains – teknologi bagi umat Muslim.

Model pengembangan patut dipilih pesantren harus melalui proses-proses yang dimulai dari munculnya sumber ide, kemudian dilakukan pendampingan, lalu disusun dengan desain pembelajaran secara matang, untuk selanjutnya diaplikasikan secara benar. Yang terakhir dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait apakah

proses yang dijalankan sesuai dengan rencana atau belum. Jika belum sesuai dengan rencana, maka harus dilakukan lagi, begitu seterusnya, sehingga ditemukan model pembelajaran yang pas dan sesuai harapan. Dengan model pengembangan seperti ini, diharapkan *output* pesantren benar-benar siap berkompetisi dengan dunia di luar pesantren.

Globalisasi juga membuat orientasi umat telah bergeser dari menuntut ilmu *an sich* menjadi menuntut ilmu demi profesi. Dalam konteks pergeseran inilah, *link and match* merupakan pilihan bijaksana pesantren. Desain pembelajaran pesantren bukan semata-mata *akhirat oriented* tetapi juga *dunia oriented*. Keduanya harus seimbang dalam rangka optimalisasi tanggung jawab manusia sebagai *Abdullah* dan *Khalifatullah*.

Bagi pesantren yang memiliki madrasah atau sekolah, *link and match* diposisikan sebagai penyempurna kurikulum yang ada di madrasah/ sekolah, sebab kurikulum madrasah/sekolah sebagian besar merupakan paket dari sistem pendidikan nasional. Sementara itu, pesantren yang tidak memiliki madrasah/ sekolah, dapat mendesain *link and match* dalam pendidikannya secara mandiri tanpa intervensi pemerintah. *Link and match* ini penting untuk menjawab kebutuhan alumni pesantren ketika mereka kembali ke masyarakat. Untuk itu, pesantren jangan lagi fokus pada kitab kuning saja, tetapi juga kitab putih sebagai sumber sains-teknologi yang paling mudah diakses oleh santri pada umumnya.

Link and match akan berhasil dengan baik apabila manajemen, upaya pengembangan sumber daya umat sangat sulit tercapai jika manajemen pesantren masih acak-acakan. Pengembangan sumber daya umat memerlukan manajemen profesional, bukan manajemen tradisional sebagaimana yang ada di pesantren-pesantren pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Abd. A'la, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta : LKiS, 2006)
- Abd. Rachman Assegaf, “*Membangun Format Pendidikan Islam di Era Globalisasi*” dalam Imam Mahalli dan Musthofa (ed), *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*, (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2004)
- Abdurrahaman Wahid, “*Principles of Pesantren Education*” dalam Manfred Oepen and Wolfgang karcher (eds.), *The Impact of Pesantren*, (Jakarta: P3M,1988)
- Ahmad Darmadji, *Pendidikan Islam dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*, “ dalam Musleh Usa dan Aden Wijaya (ed.), *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial*, (Yogyakarta: Adytya Media, 1997)
- Azyumardi Azra, *Pendidikana Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium*, (Ciputat: Kalimah, 2001)
- Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, (Yogyakarta: LKiS, 2005)
- Depag RI, *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah: Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Depag RI, 2003)
- H.A.R Tilaar, *Paradigma Baru pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002)

- Hasan Langgulang, *Peralihan Paradigma dalam Pendidikan Islam dan Sains Sosial*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)
- Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat*, (Bandung: Mizan, 1999)
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994)
- Pip. “*Santri Tidak Hanya Menguasai Kitab Kuning Saja.*” www.pondokpesantren.net, [Diakses 1 September 2016]